

Politik Islam di Jawa Awal Abad Ke-20

Muhammad Najib

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: mn598368@gmail.com

Abstract

The social dynamics of movement groups in cities is a consequence of the processes of colonization, industrialization, and capitalization. In fact, if we look at the widening dynamics that occur, they often involve socio-religious and political organizations as well as city labor syndicates. Politics in Java in the early 20th century had a broad political influence on resistance to the colonial government. The process of expanding colonial policy at the beginning of the 20th century by concentrating on urban social groups not only caused internal problems within the Dutch East Indies government, but also had an impact on the policy application process. Religious social movements, regardless of their origins, have colored the process of national movements. Several cases that have been revealed in several historical works reveal more about how social conflict occurred between social groups between interests, both economic and the founding of SI (Sarikat Islam) in 1905 or 1909, a critical culture that was built as a marker for the emergence of the Islamic movement in its segmentation process. towards resistance to colonization. The dynamics of the development of Islamic organizations is something that has the potential not only to recall the process of independence, but also to provide knowledge and learning for the next generation.

Keywords: *Islamic Politics, Java, 20th Century*

Abstrak

Dinamika sosial kelompok pergerakan di kota merupakan konsekuensi dari proses kolonisasi, industrialisasi, dan kapitalisasi. Bahkan jika dilihat pelebaran dinamika yang terjadi sering melibatkan organisasi sosial keagamaan maupun politik serta sindikat-sindikat buruh kota. Politik di Jawa awal abad XX telah mempengaruhi politik secara luas terhadap perlawanan pemerintah kolonial. Proses perluasan kebijakan kolonial pada awal abad ke XX dengan mengkonsentrasikan pada kelompok sosial masyarakat kota bukan hanya menimbulkan persoalan internal di kalangan pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga berdampak pada proses aplikasi kebijakan. Gerakan sosial keagamaan, bagaimanapun asal-usulnya, telah mewarnai proses pergerakan nasional. Beberapa kasus yang sudah pernah diungkap dalam beberapa karya sejarah lebih banyak mengungkap bagaimana konflik sosial terjadi antar kelompok sosial antar kepentingan baik ekonomi maupun Berdirinya SI (Sarikat Islam) pada tahun 1905 atau 1909, merupakan budaya kritis yang dibangun sebagai penanda munculnya gerakan Islam dalam proses segmentasinya menuju perlawanan terhadap kolonisasi. Dinamika perkembangan organisasi Islam menjadi suatu hal yang memiliki potensi tidak hanya dalam mengingat kembali proses kemerdekaan, namun juga menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi berikutnya

Kata kunci: *Politik Islam, Jawa, Abad 20*

Copyright © 2024, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

Pendahuluan

Politik di Jawa awal abad XX telah mempengaruhi politik secara luas terhadap perlawanan pemerintah kolonial. Proses perluasan kebijakan kolonial pada awal abad ke XX dengan mengkonsentrasikan pada kelompok sosial masyarakat kota bukan hanya menimbulkan persoalan internal di kalangan pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga berdampak pada proses aplikasi kebijakan. Kota-kota pada awal abad XX memberikan bukti yang penting dalam memberikan informasi bagaimana sejarah kota pada awal abad XX

mengalami persoalan yang krusial. Pertama, bahwa mekanisme kebijakan kota lebih diarahkan sebagai bentuk *recovering* terhadap segala upaya kegagalan akibat kebijakan Tanam Paksa selama periode 1870-1930. Kedua, kebijakan yang diterapkan terutama yang berkaitan dengan penataan sosial ekonomi kota telah menimbulkan paradoks. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai gerakan sosial maupun politik yang berakar pada basis sosial kota. Kedua hal di atas sangat penting dilihat sebagai upaya membuka kembali munculnya konflik-konflik sosial baik yang berlatarbelakang ekonomi maupun politik. Berbagai konflik sosial di perkotaan bukan hanya memiliki dimensi yang rumit, tetapi juga bernuansa politik (Shiraishi, 1990, Onghokham, 1975).

Studi yang lebih komprehensif lebih ditunjukkan oleh Korver dengan mencoba menganalisis Serekat Islam dengan tidak melihat sebagai gerakan politik, tetapi lebih merupakan studi sosial sebuah gerakan. Korver melihat secara manusiawi sebuah gerakan sosial-keagamaan SI. Namun belum banyak menjelaskan relasi-relasi sosial internal SI dan eksternalnya. Hal ini penting karena sangat tidak masuk akal tanpa jaringan sosial yang kuat, sebuah gerakan cukup signifikan dapat menampilkan sebuah gerakan massa dalam waktu yang cukup pendek 10 tahun pada periode awal abad XX. Gerakan sosial keagamaan, bagaimanapun asal-usulnya, telah mewarnai proses pergerakan nasional. Beberapa kasus yang sudah pernah diungkap dalam beberapa karya sejarah lebih banyak mengungkap bagaimana konflik sosial terjadi antar kelompok sosial (Shiraishi, 1990, Korver, 1986), antar kepentingan baik ekonomi maupun ideologi (Kartodirjo, 1973, Abdullah, 1967). Berdirinya SI (Sarikat Islam) pada tahun 1905 atau 1909, merupakan budaya kritis yang dibangun sebagai penanda munculnya gerakan Islam dalam proses segmentasinya menuju perlawanan terhadap kolonisasi (Kuntowijoyo, 2004).

Dinamika sosial kelompok pergerakan di kota merupakan konsekuensi dari proses kolonisasi, industrialisasi, dan kapitalisasi. Bahkan jika dilihat pelebaran dinamika yang terjadi sering melibatkan organisasi sosial keagamaan maupun politik serta sindikat-sindikat buruh kota. Karena penelitian ini hanya melihat dinamika politik keagamaan Islam sebagai bentuk pembaharuan yang berbasis kelompok, maka melibatkan organisasi sosial lainnya hanya sebagai pemicu dalam relasi sosialnya. Kajiannya dapat dilihat sebagai pola yang berbasis ekonomi namun juga berpengaruh pada aspek politis dalam pergerakan nasional.

Metode Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah heuristik dalam melakukan kajian. Langkah ini dilalui dengan melakukan pengumpulan sumber sesuai dengan tema kajian ini. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui penelusuran arsip dan dokumen lainnya. Tahap kedua, kritik sumber dengan melalui seleksi, serta dilakukan kritik ekstern maupun intern dengan maksud untuk mendapatkan keabsahan sumber. Tahap ketiga, setelah adanya kritik sumber maka dilakukan interpretasi terhadap berbagai data tentang urbanisasi dan prostitusi yang sudah terseleksi, dan pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk karya tulisan (Garraghan, 1957).

Dengan berusaha merekonstruksi hal tersebut secara sistematis dan objektif, melalui pengumpulan sumber dan dokumen yang ada, mengevaluasinya, menversifikasinya, dan mensintesis bukti-bukti (Kartodirjo, 1992) atau bahan literatur untuk merangkainya sehingga menjadi sebuah tulisan sejarah yang bertema politik Islam di Jawa abad ke XX.

Penulisan sejarah merupakan kesatuan unit historis, di mana rekonstruksinya bersinggungan dengan kategori dan dapat dipahami sebagai sesuatu yang kompleks yang meliputi problem-problem, tema-tema, dan topik-topik yang sebenarnya ditempatkan dalam pasangan waktu, (Kartodirjo, 1982) sehingga dari penulisan ini akan terlihat keterkaitan antara dinamika politik Islam serta perubahan sosial masyarakat menjadi satu jalinan peristiwa yang memenuhi kaidah ilmu sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan Politik Islam di Jawa Awal Abad ke 20

Rekonstruksi Sarekat Dagang Islam

Munculnya polarisasi kepemimpinan agama ketika memasuki zaman pergerakan kebangsaan. Dalam perkembangan masyarakat Jawa, kelompok masyarakat yang berusaha benar-benar mentaati kewajiban-kewajiban Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka disebut wong muslimin (kaum muslim), putihan (golongan putih), atau santri (murid sekolah agama). Menurut Ricklefs ada dua kelompok yang dapat dibedakan dari golongan masyarakat ini. Mereka kaum muslim yang juga berperan penting dalam dinamika gerakan politik. Pertama, kaum muslim pedesaan yang mengelompok di sekeliling para guru agama Islam (kyai) dan sekolah-sekolah agama mereka (pesantren) dan yang lainnya kelompok muslim perkotaan yang seringkali melibatkan diri di bidang perdagangan. Kelompok muslim perkotaan ini tinggal di daerah-daerah yang terpisah di kota-kota Jawa, biasanya dekat masjid ulama.

Pada awal abad XX kaum muslim perkotaan merasakan bahwa kegiatan-kegiatan dagang mereka semakin terancam oleh saingan orang-orang Cina. Oleh karena itu, seorang lulusan OSVIA (Sekolah latihan untuk para pejabat pribumi) bernama Tirtoadisurjo mendirikan Serekat Dagang Islamiyah di Batavia tahun 1909. Ia seorang wartawan yang telah meninggalkan pekerjaan di dinas pemerintahan. Pada tahun 1911 dia mendirikan organisasi yang sama di Buitenzorg (Bogor). Kedua organisasi tersebut bertujuan untuk membantu pedagang-pedagang bangsa Indonesia dalam menghadapi saingan orang-orang Cina. Pada tahun 1911 dia mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta bernama Haji Samanhoedi (1868-1959) untuk mendirikan Serekat Dagang Islam sebagai suatu koperasi pedagang batik anti China. Kemudian berdiri cabang-cabang lainnya, H.O.S Tjokroaminoto (1882-1934) menjadi pemimpin organisasi tersebut di Surabaya. Dia juga seorang lulusan OSVIA yang telah mengundurkan diri dari dinas pemerintahan.

H.O.S Tjokroaminoto merupakan tokoh yang memiliki popularitas dan charisma karena sikapnya yang memusuhi orang-orang memegang kekuasaan, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia dan cepat menjadi pemimpin yang paling terkemuka dari gerakan ini. Setahun kemudian organisasi tersebut merubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Terjadi perselisihan antara Tirtoadisurjo dan Samanhudi, sehingga Samanhudi yang sebagian besar waktunya tersita untuk urusan-urusan dagang, meminta bantuan Tjokroaminoto untuk memimpin organisasi tersebut.

Asal-usul organisasi yang bersifat Islam dan dagang menjadi kabur, karena istilah Islam pada namanya kini sedikit banyak lebih pada gambaran adanya kesadaran umum bahwa anggota-anggotanya yang berkebangsaan Indonesia adlah kaum muslim. Sedangkan orang Belanda dan China adalah nn muslim. Sementara Tjokroaminoto nampaknya seorang yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam, (Ricklefs, 2007) jika dibanding

dengan para ulama atau kaum agamawan dari keturunan Arab yang aktif dalam organisasi pergerakan.

Sebagai organisasi masa yang bergerak secara ekonomi melalui kegiatan perdagangan, SI menyatakan setia pada rezim Belanda. Namun, saat organisasi ini berkembang di desa-desa maka meletuslah tindak kekerasan (Suminto, 1985). Rakyat pedesaan tampaknya lebih menganggap SI sebagai alat membela diri terhadap struktur kekuasaan lokal yang tidak sanggup mereka hadapi daripada gerakan politik modern. Oleh karenanya organisasi ini sebagai simbol kesetiakawanan kelompok yang dipersatukan dan didorong oleh perasaan tidak suka pada orang-orang Cina, pejabat priyayi (bukan anggota SI), dan orang-orang Belanda. Munculnya aksi boikot yang dilakukan terhadap pedagang batik Cina di Surakarta dengan cepat meningkatkan aksi saling menghina antara Cina-Indonesia dan tindakan kekerasan di seluruh Jawa. Sedangkan di beberapa daerah SI benar-benar menjadi pemerintahan bayangan dan para pejabat priyayi harus menyesuaikan diri. Tahun 1913-1914 terjadi pergolakan tindak kekerasan yang sangat hebat di kota-kota dan desa-desa, cabang-cabang Serekat Islam Lokal (Ricklefs, 2007) memainkan peranan signifikan dalam dinamika politik tersebut.

Pihak pemerintah kolonial sangat hati-hati dalam mendukung organisasi ini, melalui Gubernur Jendral Idenburg memberi pengakuan resmi kepada SI. Dia mengakui organisasi tersebut sebagai suatu kumpulan cabang-cabang yang otonom saja daripada sebagai suatu kumpulan nasional yang dikendalikan oleh markas besarnya (Central Serekat Islam, CSI). Tindakan ini dilakukan untuk membantu para pemimpin pusat organisasi baru dengan tidak membebani CSI oleh tanggung jawab hukum atas kegiatan-kegiatan semua cabang SI. Namun, akibat keputusannya itu kenyataannya CSI menjadi semakin sulit melakukan pengawasan. Orang-orang Belanda lainnya beranggapan bahwa pengakuan resmi Gubernur Jenderal Idenburg terhadap SI sama sekali keliru, keberadaan organisasi ini sebenarnya adalah kesalahan pengakuan Idenburg. (Ricklefs, 2007). Ia seorang jenderal Belanda yang memberikan ruang lahirnya gerakan nasionalis keagamaan sejak menjabat tahun 1909. gerakan kaum pribumi tersebut menjadi semakin radikal, seringkali dimaknai secara satiris SI tersebut menjadi "Salah Idenburg" (A.P. Korver, 1985, Shirashi, 2005). Pada kenyataannya merupakan gerakan berbasis pada cabang-cabangnya sangat kontradiktif dengan eksistensi kekuasaan mereka.

Perubahan SDI menjadi SI bukan saja perubahan nama saja, tetapi juga dalam orientasi yaitu bidang ekonomi ke bidang politik. Perubahan hendak mencari formulasi ke arah kemajuan dari segala aspek bukan hanya sekedar berdagang. Terbukti SI mampu mengakomodir jumlah anggotanya yang beraneka ragam kelas sosialnya. Organisasi ini dalam pergerakan selanjutnya meluaskan kegiatannya dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajah (Mansur, 2004).

Tidaklah mengherankan dalam konteks pergerakan nasional, banyak orang mengatakan bahwa sebetulnya organisasi massa pertama adalah SDI/SI, bukanlah Budi Utomo yang sangat bersifat Chauvinistik. Keberadaan SDI sampai berubah menjadi SI jauh melampaui rasa nasionalisme kebangsaan yang dikemas dalam bentuk solidaritas sosial keagamaan berbasis ekonomi kemudian menjadi sangat politis dalam perkembangannya karena tekanan dari pemerintah kolonial Belanda.

Kompetisi Masyarakat Arab di Indonesia

Kedudukan orang-orang Arab di Indonesia pada masa yang dibicarakan ini, tidak dapat disamakan dengan kedudukan orang Cina dan Eropa di Indonesia. Orang-orang Arab memiliki privileg untuk masuk dalam Indonesia salah satunya beragama Islam yang juga diimani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, umumnya mereka juga adalah orang-orang yang berasal dari ibu-ibu Indonesia, berbicara dengan ibu mereka, kadang-kadang tanpa mengetahui bahasa Arab. Mereka juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan Indonesia, terutama bagi mereka yang termasuk golongan sayid. Dalam sejarah abad ke 20, mereka lambat laun menjadi orang-orang Indonesia benar, seperti yang dicerminkan oleh pendiri partai Arab Indonesia pada tahun 1934. Dapat juga dikatakan bahwa pembaharuan lembaga-lembaga pada kalangan masyarakat Arab melimpah pada masyarakat Asli.

Banyak orang-orang Arab datang dari Hadramut ke Indonesia untuk memperbaiki ekonomi. Dalam hal ini mereka tidak membawa serta anak dan istri, sehingga terjadilah kawin-mawin antara orang bangsa Arab dengan wanita dari Indonesia (Burhani, 2010). Walaupun umumnya mereka senang di Indonesia, banyak di antara mereka yang mengirimkan anak-anak mereka kembali ke negara asal mereka untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak ini kemudian kembali ke Indonesia seperti pula yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka dan lagi-lagi dengan memperistri wanita-wanita Indonesia.

Orang-orang Arab tersebut banyak mempunyai hubungan dengan penduduk di desa sebagai pedagang. demikian pula sebagai orang-orang yang seagama, mereka berpartisipasi dalam kehidupan agama dari kebanyakan orang-orang Indonesia. Sebagai orang Arab mereka masih memiliki minat terhadap perkembangan negeri-negeri Arab, sekurang-kurangnya mereka ingin mengetahui apa yang terjadi di negeri tersebut, untuk keperluan mereka berlangganan bermacam-macam harian dan majalah yang diterbitkan di berbagai kota di Timur Tengah seperti Istanbul, Kairo, dan Bairu, ataupun mereka menerima majalah-majalah ini dari teman-teman mereka di Singapura atau negeri-negeri di Arab sendiri yang dikirimkan melalui pos atau sesekali dibawa langsung ke Indonesia dalam kunjungan-kunjungan singkat. Yang terpenting diantara penerbit ini ialah *Al - Urwat al- wutsqa* yang diterbitkan di Paris pada tahun 1884 oleh kedua pembaharu, Jamal al-Din al-afghani dan Muhamad Abduh.

Masyarakat Arab di Indonesia itu mencerminkan ciri-ciri yang sama dengan masyarakat hadramaut. Bergantung pada darah keturunan, mereka tergolong sayid dan bukan sayid. Di samping itu mereka pun terbagi pula dari golongan manasib bergantung kepada apakah mereka termasuk golongan yang berkuasa atau tidak. Golongan sayid menikmati kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan terutama berhadapan dengan orang-orang Indonesia, mereka menuntut kedudukan yang lebih tinggi dalam kacamata agama sungguhpun ibu-ibu mereka bukan Sayid, malahan bukan orang Arab. Sayid yang taat dianggap sebagai wali, dan apabila mereka meninggal kuburan mereka dikunjungi oleh banyak orang sepanjang tahun sebagai tempat suci untuk diziarai dimana nazar dibayar, doa dipanjatkan, kemenya dibakar dan segala macam korban diberikan.

Dalam lingkungan orang-orang sayid di Indonesia terjadi suatu kompetisi. Mereka yang golongan yang munasib hadramut, tetapi tinggal di Indonesia menuntut kedudukan yang lebih tinggi berhadapan dengan sayid lain yang bukan termasuk munasib. Yang tidak menyukai pembagian yang sedemikian di kalangan masyarakat Arab di Indonesia, dan mempunyai juga menunjukkan pengaruhnya dalam perkembangan negara asal mereka. Tambahan lagi mereka menentang konservatisme dari kalangan manasib di Hadramut karena dengan sikap

konservatif ini sifat-sifat mendidik anak yang dikirim pulang akan terpengaruh pula secara yang tidak mereka inginkan. Golongan manasib, dan pada umumnya golongan sayid di Hadramut, "mereka menolak tiap inovasi, apakah inovasi material ataupun intelektual". Mereka menganggap "apapun yang datang, apalagi dari Eropa sebagai suatu yang harus dicurigai.

Golongan yang progresif di Indonesia, terutama keluarga Aal Yahya dan Aal Syihab, bersama-sama dengan beberapa pihak dari kalangan yang bukan sayid di Jakarta, berkeyakinan bahwa langkah pertama untuk memperbaiki keadaan adalah dengan membina bidang pendidikan. Ketidak-senangan, sekurang-kurangnya ketidak serasian, mereka terhadap Belanda menyebabkan mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Belanda, lagi pula jumlah sekolah ini tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pendidikan pada umumnya. Sebuah rangsangan yang lain untuk memperhatikan bidang pendidikan adalah upaya kenyataan bahwa orang-orang cina di Jakarta telah mengorganisasikan diri dalam Tiong Hoa Hwee Koan, yang juga didirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka.

Organisasi Islam, Dinamika Pergerakan dan Peranan Tokohnya Pendidikan Bagi Masyarakat di Indonesia

Demikianlah Al-Jam'iyat al Khairiyah, yang lebih dikenal dengan Jam'at Khair, didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini terbuka untuk setiap muslim tanpa diskriminasi asal usul, tetapi mayoritas anggota-anggotanya adalah orang-orang Arab. Anggota-anggota dan pemimpin-pemimpin organisasi ini umumnya terdiri dari orang-orang berada, yang memungkinkan menggunakan sebagian waktu mereka kepada perkembangan organisasi tanpa merugikan usaha pencarian nafkah.

Dua bidang kegiatan diperhatikan oleh organisasi ini. Yang pertama pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar, yang kedua penerimaan anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. Bidang kedua ini segera terhambat oleh kekurangan biaya dan juga karena kemunduran khilafat.

Sekolah dasar Jam'iat tahun 1905. Ini bukan satu sekolah yang semata-mata bersifat agama, namun merupakan suatu sekolah dasar baiasa di mana bermacam-macam mata pelajaran seperti berhitung, sejarah umum (umumnya sejarah Islam) dan ilmu bumi diberikan. Kurikulum disusun, sedangkan kelas-kelas telah terorganisasi. dalam hal ini bahasa perantara yang digunakan yaitu bahasa Indonesia atau bahasa melayu, hal ini sesuai dengan lingua franca di kalangan anak-anak arab di Indonesia yaitu bahasa melayu dan bahasa daerah (seperti bahasa Lampung) yang terdaftar di sekolah tersebut. Pada saat yang sama bahasa Belanda tidak diajarkan dan diganti oleh bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib.

Persyarikatan Ulama

Haji Abdul Halim dan Hayatul Qulub

Gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat, yang kemudian berkembang menjadi persyarikatan Ulama, dimulai pada tahun 1911 atas inisiasi Haji Abdul Halim yang lahir di Cibelerang, Majalengka tahun 1887, Kedua orang tuanyaberasal dari keluarga yang taat beragama, (ayahnya adalah seorang penghulu di jatiwangi), sedangkan famili-familinya tetap mempunyai hubungan yang erat secara keluarga dengan orang-orang dari kalangan pemerintah.

Halim memperoleh pelajaran agama pada masa kanak-kanak dengan belajar di berbagai pesantren di daerah Majalengka sampai pada umur 22 tahun, ketika ia pergi ke Mekkah untuk naik haji dan untuk melanjutkan pelajarannya. Selama tiga tahun di Mekkah Halim juga mengenal tulisan-tulisan Abduh dan Jamalal-din al-afghani, yang merupakan pokok pembicaraan bersama kawan-kawannya. Kawan-kawan ini banyak berasal dari daerah Sumatera, Tetapi juga di Mekkah inilah ia pertama kali mengenal Kiyai Haji Mansur yang kemudian menjadi Ketua umum Muhammadiyah. Meskipun pergaulan dengan teman-teman dan kegiatan membaca kitab Abduh dan Al-Afghani seperti ini, Halim tidaklah merasa ia banyak dipengaruhi oleh Abduh atau Al-Afghani. Memang sampai ia meninggal tahun 1962 ia tetap berpegang pada mazhab Syafe'i. Hal yang memberikan kesan baginya adalah dua lembaga pendidikan, sebuah di Bab al-Salam dekat Mekkah dan sebuah lagi di Jeddah, yang menurut ceritanya telah menghapuskan sistem halakah dan sebagai gantinya mengorganisir kelas-kelas serta menyusun kurikulum dengan juga menggunakan bangku dan meja. Lembaga ini merupakan contoh baginya kelak untuk mengubah sistem pendidikan tradisional di daerah asalnya sekembali ia ke tanah air. Pada tahun-tahun kemudian kegiatannya lebih dirangsang oleh pandangan rendah dari pihak familinya yang masuk dalam golongan priyayi terhadap keluarganya, termasuk ayahnya sendiri. Ia ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa seorang bukan priyayi dapat pula melayani masyarakat dengan baik.

Enam upaya setelah ia kembali dari Mekkah pada tahun 1911, Halim mendirikan sebuah organisasi yang ia beri nama Hayatul Qulub, yang bergerak di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan. Anggota-anggotanya mulanya enam puluh orang, umumnya terdiri dari pedagang dan petani. Mereka membayar iuran masuk sepuluh send dan iuran mingguan lima sen, yang dimaksudkan sebagai suatu dana untuk mendirikan sebuah perusahaan tenun. Organisasi ini juga bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina.

Dalam pendidikan Halim mulanya menyelenggarakan pelajaran agama sekali seminggu untuk orang-orang dewasa, yang diikuti kira-kira empat puluh orang. Umumnya pelajaran yang ia berikan adalah pelajaran-pelajaran fiqih dan hadist. Ketika itu Halim tidak semata-mata mengajar saja kerjanya, tetapi juga bergerak di bidang perdagangan untuk memenuhi nafkah hidupnya.

Muhammadiyah Gerakan Masyarakat Pribumi

Sebuah organisasi Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia II dan juga sampai sekarang ini adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiyai Haji Ahmad dahlan atas sasaran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifar permanen.

Ahmad dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiyai Haji Abubakar bin Kiyai Sulaiman, khotib di Masjid Sultan kota. Ibunya adalah anak Haji Ibrahim, penghulu. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahu, fiqih dan tafsir di Yogya dan sekitarnya, ia pergi ke Mekkah tahun 1890 di mana ia belajar selama satu tahun. Salah seorang gurunya ialah Syaikh Ahmad Khatib. Sekitar tahun 1903 ia mengunjungi kembali Tanah Suci dimana ia selama dua tahun lamanya.

Berdirinya Muhammadiyah merupakan upaya untuk mewujudkan cita mendirikan organisasi masyarakat pribumi yang berorientasi pada gerakan modernisme Islam. KH Ahmad

Dahlan juga mendirikan sekolah modern dengan organisasi yang permanen supaya tidak tutup ketika para pendirinya sudah tidak ada, sebagaimana terjadi pada pesantren tradisional pada masa itu. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, ia memiliki cita-cita pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam dari takhayul, bid'ah, dan khurafat (Buchori, 2009).

Organisasi Persatuan Islam

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920-an ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah lebih dahulu maju dalam berusaha untuk mengadakan pembaharuan dalam agama. Bandung kelihatan agak lambat memulai pembaharuan ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sengguhpun Serikat Islam telah beroperasi di kota ini semenjak tahun 1913. Kesadaran tentang keterlambatan ini merupakan cambuk untuk mendirikan sebuah organisasi.

Persis didirikan oleh KH Zamzam seorang ulama yang pernah bermukim di Mekkah untuk menuntut ilmu, namun tokoh yang paling menonjol di persis adalah Ahmad Hasan yang dianggap guru persis yang utama. Tokoh ini pemberi corak gaya yang populer tidak mengenal kompromi, konsisten dan tegas dalam prinsip dakwahnya. Nama lainnya juga dalam tokoh Persis ini adalah Mohammad Natsir, yang saat itu merupakan seorang anak muda yang sedang berkembang dan bertindak sebagai juru bicara organisasi ini di kalangan kaum terpelajar (Buchori, 2009).

Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama secara bahasa berarti kebangkitan Ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 16 rajab 1344/31 Januari 1926 di Surabaya. Latar Belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia islam pada waktu itu.

Pada awalnya pendirian NU merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Basis utama dari organisasi ini adalah jaringan pesantren yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Kalimantan Selatan. Di Jawa Barat NU memiliki basis di daerah Cirebon dan Tasikmalaya (Azra, dkk., (ed), 2015). Pada saat agresi militer Belanda kedua di Surabaya, NU telah memberikan sumbangsih besar terhadap bangsa Indonesia. Melalui fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa ini kemudian dinamai Resolusi Jihad NU untuk mengusir segala bentuk kolonial dan imperialism yang menduduki Indonesia. Resolusi jihad NU mampu mengerakkan massa dari luar Surabaya untuk ikut berperang melawan Belanda dan sekutunya.

Perlawanan Politik Akhir Abad Ke 20: Putra Jawa Hookoo Kai atau Miai Masyumi Putra/Jawa Hookoo-Kai

Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan fasis Jepang mendarat di Banten Jawa Barat, dan gerak cepat pasukan fasis Jepang menuju Batavia (Jakarta) serta tanggal 5 Maret 1942 diduduki; tiga hari kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Jhr. Tjarda van Stakenborg stacchouwer bersama komandan tentara KNIL Letnan Jendral Hein ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Imamura (Komandan pasukan fasis Jepang ke-XVI) di Kalijati Jawa Barat pada tanggal 9 Maret 1942.

Setelah Jepang menguasai Sumatera dan Jawa, maka Letnan Jenderal Hitoshi Imamura memerintahkan pada Jenderal Fujiyama di Bukit Tinggi agar memberi bantuan kepada Soekarno untuk kembali ke Jawa. Lima setengah bulan setelah pendaratan pasukan fasis Jepang di Banten, Soekarno tiba di pelabuhan Pasar Ikan Jakarta, disambut oleh Mohammad Hatta, Sartono dan Anwar Tjokroaminoto. Soekarno dibawa menghadap Imamura di istana yang dulu di tempati oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hasil pertemuan itu terdapat kesepakatan untuk menjalin kerjasama antara pasukan fasis Jepang yang diwakili oleh Imamura dengan golongan nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno disetujui oleh Hatta sehingga sejak itu Soekarno-Hatta melalui gerakan 3A (Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia), gerakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan gerakan Jawa Hoo-Kai (Penghimpun Kebaktian Rakyat Jawa) menggerakkan dan menghimpun rakyat, di satu pihak untuk kepentingan pasukan fasis Jepang dan dilain pihak untuk mempersiapkan rakyat guna menerima kemerdekaan, jika waktu telah datang (Anwar, 1985).

Miai/Masyumi

Peralihan yang cepat dari penguasa kolonial Belanda kepada penguasa fasis Jepang yang kejam, tidak ada lagi pilihan antara kooperasi dan non-kooperasi. Kalau pada zaman kolonial Belanda hukuman yang paling kejam sebagai aktivis politik yaitu penjara atau pembangunan, tetapi pada zaman fasis Jepang adalah penyiksaan atau kematian merupakan bayangan yang setiap saat mengancam para pejuang Islam.

Perubahan situasi yang mencekam ini, umat Islam masih lebih besar dari pada golongan nasionalis sekuler. Pertama umat Islam mempunyai basis keyakinan agama, yang menjadi sumber kekuatan mental dan moral dibanding dengan sentiment nasionalisme, yang dimiliki oleh golongan nasionalisme sekuler. Kedua mempunyai dukungan rakyat yang luas di desa-desa (Anwar, 1985). Oleh karenanya dalam menghadapi penguasa fasis Jepang, umat islam masih lebih mampu untuk tidak begitu saja bertekuk lutut, dibanding dengan golongan manapun, termasuk golongan nasionalis sekuler yang paling radikal sekalipun.

Dari sikap perlawanan secara terbuka dari umat Islam, seperti antara lain dilancarkan oleh Amrullah dan Mansur, akhirnya penguasa fasis Jepang mundur selangkah dengan menghilangkan kewajiban Sei-Keire bagi umat Islam dalam upacara-upacara resmi. Keputusan ini dikemukakan oleh Husein Djajadiningrat, sebagai salah seorang pemimpin Shumubu, sewaktu menerima utusan umat islam dari Sumatra, seperti ucapannya: "Pemerintah militer Jepang telah menyadari bahwa Sei-Keire bertentangan dengan kepercayaan Islam. Konsekuensinya hal itu tidak lagi dituntut di dalam pertemuan-pertemuan orang-orang Islam" (Anwar, 1985).

Tafsir Terhadap Pergolakan Politik Islam Periode Jepang

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka tampak dengan jelas bahwa golongan nasionalis sekuler adalah kelompok pertama yang melakukan kerjasama dengan penguasa fasis Jepang tanpa syarat. Artinya walau kerjasama itu sangat merugikan dan menyengsarakan bangsa Indonesia pada akhir kematian massal seperti yang diderita oleh anggota-anggota kerja paksa (romusha), mereka tetap setia menyokongnya; sehingga tidak ada dari golongan nasionalis sekuler yang melakukan protes, apalagi melawan terhadap kezaliman penguasa fasis Jepang. Atas kerjasama "setia" ini, penguasa fasis Jepang memberikan imbalan berupa jabatan-jabatan penting baik di legislatif maupun di eksekutif, sehingga kemudian hari,

setelah pasukan fasis Jepang angkat kaki dari Indonesia, golongan nasionalis sekuler menjadi waris tunggal.

Berbeda dengan kaum Muslimin (nasionalis-Muslim) sejak awal kehadiran fasis Jepang bersikap resisten akan keberadaan Jepang. Sikap resistensi ini semakin kuat dengan adanya pembubaran partai-partai Islam bahkan dengan sengaja membubarkan wadah satu-satunya federasi umat Islam. Hal ini menimbulkan kerjasama kaum Muslimin dengan penguasa fasis Jepang didasari pada kecurigaan, sehingga setiap kebijaksanaan penguasa yang dianggap merugikan Islam dan bangsa Indonesia, secara garis keras menentang dengan terbuka. Sejalan dengan hal tersebut, golongan nasionalis sekuler yang menjalin kerjasama dengan Jepang menambahkan kebencian terhadap kaum Muslimin. Implikasinya kaum Muslimin tidak diberikan fasilitas untuk kemerdekaan Indonesia.

Walau dalam menghadapi janji kemerdekaan Indonesia, kaum Muslimin telah membuka usahanya dengan dunia internasional seperti keterlibatan dengan Kongres Islam se-Dunia, yang hasilnya nanti dipetik setelah proklamasi yakni berbentuk pengakuan *de facto* dan *de jure* yang pertama terhadap Indonesia adalah berasal dari negara-negara Islam dari dunia Arab; tetapi untuk menjadi pewaris Jepang, umat Islam tidak mendapat bagian apa-apa. Hampir seluruh pewaris Jepang jatuh ke tangan golongan nasionalis sekuler. Sebagai pewaris Jepang, golongan nasionalis sekuler, yang sejak zaman pergerakan tidak senang dengan kaum Muslimin bahkan ada semacam sikap fobia terhadap hampir setiap gagasan yang keluar dari kaum Muslimin, khususnya tentang nasib Indonesia merdeka, maka penyingkiran peran dan potensi umat Islam dalam percaturan politik di dalam lembaga-lembaga yang bersifat legislative dan eksekutif di akhir kekuasaan fasis Jepang, menjadi realitas yang nyata (Djailani, 1996).

Kesimpulan

Dinamika politik Islam di Jawa Awal Abad XX memberikan kontribusi dalam wacana pergerakan dan nasionalisme. Peran tokoh Islam dalam melakukan aktivitasnya juga memberi peluang pada proses perlawanan terhadap kolonisasi sejak periode akhir kolonial sampai rezim pemerintahan militer Jepang. Organisasi kemasyarakatan bersifat keagamaan yang sangat populer seperti Jamiat Khair, Al Irsyad, Persyarikatan Ulama, Persis, Masyumi, Muhammadiyah, dan NU merupakan pelopor pergerakan dalam perpolitikan Islam di tanah air. Berbagai organisasi masyarakat yang berbasis Islam munculnya dilator belakang oleh faktor kepentingan secara ekonomi, politik dan misi keagamaan. Diantaranya adanya solidaritas yang dilakukan oleh umat Islam sendiri melawan penjajahan dan kolonisasi maupun serangan dari pihak luar yang berusaha mencemari pemikiran umat Islam dengan akidah-akidah sesat serta budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Umat Islam Indonesia inilah yang mendorong tokoh-tokoh pergerakan keagamaan membentuk organisasi untuk menghimpun kekuatan demi perjuangan dan membangun nasionalisme kebangsaan.

Kelompok dagang berbasis keagamaan tidak hanya sebagai ikatan sosial, namun juga berpengaruh pada perwujudan ke arah pergerakan nasional. Hal ini membangun semangat yang bermula persinggungan berbasis lokal (sosial ekonomi) sampai menjadi gerakan yang membawa perubahan yang dimotori oleh kelompok berbasis keagamaan tersebut. Ada beberapa fokus perhatian dalam konstruksi pergerakan politik Islam pada awal abad XX. Pertama, terbentuk ikatan solidaritas keagamaan yang berbasis kepentingan ekonomi yang dimotori oleh para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Kedua, pemurnian ajaran Islam dan

membangun karakter melalui pelembagaan pendidikan yang konvensional maupun modern. Ketiga, menguatkan basis kelompok massa melakukan pergerakan secara politis untuk tujuan membebaskan bangsa Indonesia dari kaum penjajah (pemerintahan kolonial Belanda). Dinamika perkembangan organisasi Islam menjadi suatu hal yang memiliki potensi tidak hanya dalam mengingat kembali proses kemerdekaan, namun juga menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi berikutnya.

Referensi

- Anwar, R. (1985). *Musim Berganti*. Jakarta: Grafitipers.
- Azra, A. dkk., (2015). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia; Institusi dan Gerakan*. Jilid 3. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud.
- Buchori, D. S. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Intermesa.
- Burhani, A. N. (2010). *Muhammadiyah Jawa*. Jakarta: Al-Wasath
- Djailani, A. Q. (1996). *Peta Sejarah Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya: CV. Tri Bakti.
- Korver, A.P. (1985). *Serekat Islam: Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Grafiti.
- Kuntowijoyo. (2004). *Raja Priyayi dan Kawula*. Yogyakarta: Ombak.
- _____ (1994). *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Mansur, (2004). *Sejarah Serekat Islam dan Pendidikan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C., (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shirashi, T. (2005). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*, cet II, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suminto, A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.